



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TATANG MARHAENDRATA**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **464796**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.990.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/60 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/60 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/60 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 216.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/60 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 324.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/85 m² di KAB / KOTA LAMONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 401.000.000
6. Tanah Seluas 2500 m² di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 238.000.000
7. Tanah Seluas 2400 m² di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 311.000.000
8. Tanah Seluas 1437 m² di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 131.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 280.500.000

1. MOTOR, HONDA\ SPM/SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000



3. MOTOR, HONDA D1B02N12L2A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA D1A02N18M1 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA X1H02N35M1 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI
Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.300.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	195.996.324
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.467.796.324
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.467.796.324

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.